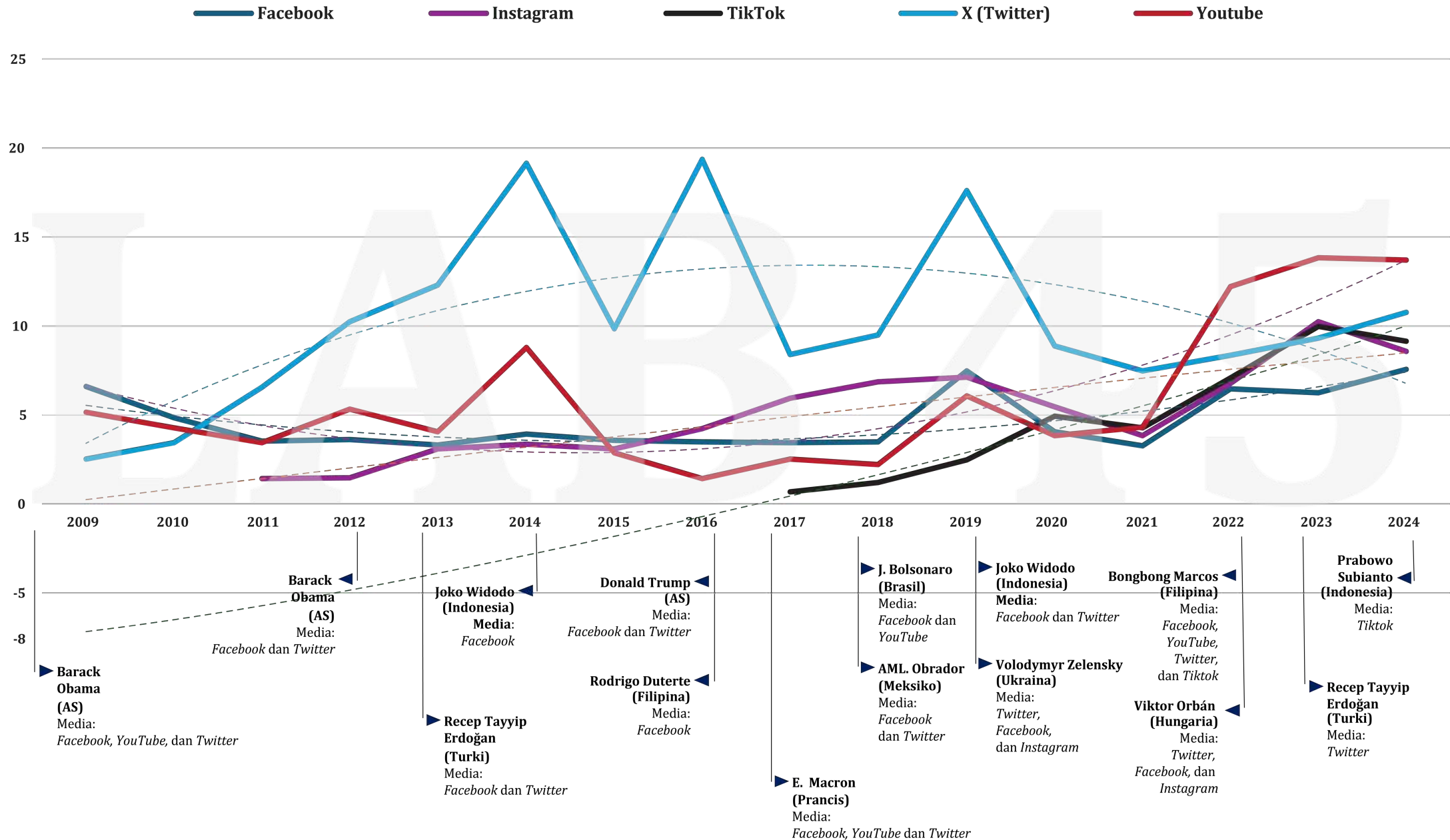




Gaduh Politik Keamanan di Media Sosial 2020-2024

Proporsi Konten Politik Media Sosial & Pemanfaatan oleh Presiden Dunia



Gaduh dan Blunder Politik

- Pembubaran FPI
- 30 Desember
Reshuffle Menteri
- 30 November -27 Desember
Kasus Pengadaan Tas Bansos Gibran
- 30 November – 27 Desember
Penembakan 6 anggota FPI
- 30 November – 6 Desember
Korupsi Mensos Juliari Batubara
- November
Ali Kalora
- 26 November
Kasus Korupsi Mantan Menteri KKP Edhy Prabowo
- 20-25 September
Kasus Penembakan OPM di Intan Jaya dan Pembunuhan Pendeta Yeremima
- 3 November
Penolakan Omnibus Law
- Juni
RUU HIP
- Maret
Kasus Covid Pertama di Indonesia

- 26-29 Juni
BEM UI – Jokowi King of LipService
- 7-8 Mei
Blunder Bipang Jokowi
- 25-29 April
Penetapan KKB sebagai Teroris
- 25-26 April
Penembakan Kabinda Papua
- 21-24 April
Kecelakaan KRI Nanggala 402
- 28-30 Maret
Teror Bom Makassar
- 1-28 Maret
Wacana Presiden 3 Periode
- 6-7 Maret
Isu Ghosting Kaesang-Felicia
- 1-28 Februari
Peraturan Presiden Tentang Investasi Miras
- 1-26 Februari
Revisi UU ITE
- 1 Februari
Kudeta Partai Demokrat
- 4-10 Januari
Blunder Gelandangan Mensos Risma

- 1 Januari - 9 Desember
Penundaan Pemilu & Perpanjangan Masa Jabatan Presiden
- 1 Januari - 9 Desember
Tragedi Kanjuruhan
- 21-22 Desember
Jokowi dan Kambing Hitam
- 10 Juli-9 Agustus
Brigadir J dan Ferdy Sambo
- Mei
LGBT
- 23-25 Februari
Isu Penundaan Pemilu 2024
- 2 – 9 April & 11 April
Aksi Mahasiswa 11 April
- Isu: Penolakan penundaan pemilu, perpanjangan masa jabatan, kenaikan harga bahan pokok dan bbm
- 26 Januari
Flight Information Region
- 18-23 Januari
Polemik UU IKN
- 12-18 Januari
Korupsi Satelit Kementerian Pertahanan

- 1-16 Oktober
Putusan MK terkait Batas Usia Capres-Cawapres
- 20-27 September
Kaesang menjadi Ketum PSI
- 7-18 September
Penggusuran untuk Rempang Eco City
- 1-27 Maret
Polemik Keikutsertaan Israel dalam Piala Dunia U – 20 di Indonesia
- 6 – 7 Februari
Penyanderaan Pilot Susi Air
- 30 Desember 2022 –
3 Januari 2023
Polemik UU IKN
- 29 Desember 2022 –
4 Januari 2023
Polemik Sistem Pemilu Proporsional

- 28 Mei – 14 Juli
Revisi UU TNI dan UU Polri
- 20-22 Agustus
Aksi Kawal Putusan MK
- 12-19 Agustus
Reshuffle Kabinet Jokowi Jelang Akhir Masa Jabatan

2020 2021 2022 2023 2024

- Januari
Terawan: Respons Covid-19 "enjoy saja"
- Februari
Muhadjir Effendy: Usul orang kaya menikahi orang miskin untuk memutus mata rantai kemiskinan
- Februari
Airlangga Hartarto & Wishnutama: Rencana alokasi Rp72 M untuk media dan influencer untuk promosi wisata
- Februari
Airlangga Hartarto & Mahfud MD: Covid-19 tidak masuk ke Indonesia karena perizinan di Indonesia berbelit-belit
- Februari
Ma'ruf Amin: Indonesia terhindar dari Corona berkat doa kiai dan *qunut*
- Februari
Insentif untuk maskapai
- Maret
Tito Karnavian: Dampak kematian Covid-19 relatif rendah

- April
Luhut B Pandjaitan: Covid-19 tidak tahan cuaca panas Indonesia
- April
Polemik perbedaan mudik dan pulang kampung
- April
Yasonna Laoly: Usul bebaskan napi koruptor lansia karena Covid-19
- Mei
Mahfud MD: Corona seperti istri tak bisa ditaklukkan
- Agustus
Tjahjo Kumolo: Bagikan link film bajakan
- September
Puan Maharani: Pernyataan semoga Sumbar mendukung negara Pancasila

- April
Prabowo Subianto: Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kemhan
- Juli
Tri Rismaharini: Ancam akan memindahkan ASN di Balai Wyata Guna ke Papua karena dinilai tidak tanggap
- Oktober
Tjahjo Kumolo: Unggah foto hoaks Tol Cismudawu di Twitter
- Oktober
Yaqut Cholil: Kemenag adalah hadiah negara untuk NU
- November
Siti Nurbaya: Pembangunan Jokowi tak boleh berhenti atas nama deforestasi
- November
Moeldoko: Polemik kudeta Demokrat
- November
Tegur Kapolres karena *sowan* ke Ormas
- November
Tri Rismaharini: Paksa anak tuli berbicara

- Januari
Luhut B Pandjaitan: Kasus pencemaran nama baik (Haris-Fatia)
- Februari
Ida Fauziah: Membatasi komentar di akun Instagram pribadi karena kritik atas aturan baru pencairan JHT
- Februari
Yaqut Cholil : Polemik azan dan gonggongan anjing
- Maret
Luhut B Pandjaitan: Klaim punya Big Data berisi suara rakyat ingin Pemilu ditunda
- Maret
Muhammad Lutfi: Akui tak kuasa control mafia minyak goreng
- 20-21 Desember 2022
Blunder Luhut Binsar terkait OTT KPK
- Juli
Johhny G Plate: Aturan PSE Kominfo, pemblokiran situs, ketidakhadiran Kominfo

- Januari
Mengizinkan wisatawan asal Tiongkok untuk berkunjung ke Indonesia pada saat kasus Covid meningkat di negara itu
- Mei
Cawe-cawe Pilpres 2024
- Juni
Prabowo: Proposal damai Rusia-Ukraina
- Juni
Luhut B Pandjaitan: Wacana audit LSM
- Juni
Prabowo: Pembelian Jet bekas
- Agustus
Meminta penerima LPDP pulang ke Indonesia meskipun gaji lebih rendah

- September
Klaim pegang data intelijen parpol
- September
Budi Arie: Usul pemungutan pajak untuk *judi online*
- September
Budi Arie: Ingin tunjuk Wulan Guritno sebagai duta *judi online*
- Oktober
Bahlil Lahadalia: Klaim isu tiga periode atau penundaan Pemilu 2024 sebagai kesalahannya
- Desember
Zulkifli Hasan: Kelakar tentang '*amin*' dan tahiyat

- 24 Januari 2024
Pernyataan Jokowi soal Keberpihakan
- Januari
Prabowo: Boleh menerima politik uang
- Juni
Muhadjir Effendy: Korban *judi online* bisa menjadi penerima bansos
- Juni
Budi Arie: Sebut perempuan lebih kejam dari laki-laki, respons kasus polisi membakar suami
- Juni
Budi Arie: Ucap '*Alhamdulillah*' PDN diserang *hacker*
- Juli
Muhadjir Effendy: Dukung mahasiswa gunakan pinjol untuk bayar UKT

- Agustus
Prabowo: Singgung operasi intelijen untuk memata-matai lawan politik
- Agustus
Sindirani '*ditinggal ramai-ramai*'
- September
Budi Arie: Akun Fufufafa bukan Gibran
- September
Budi Arie: Bela istri Kaesang, tidak boleh naik transportasi umum karena hamil
- September
Sedimen dan pasir laut adalah sesuatu yang berbeda

Nodes : 933.332
Edges : 139.295
Akun : 132.878
Post : 898.285

Social Network Analysis

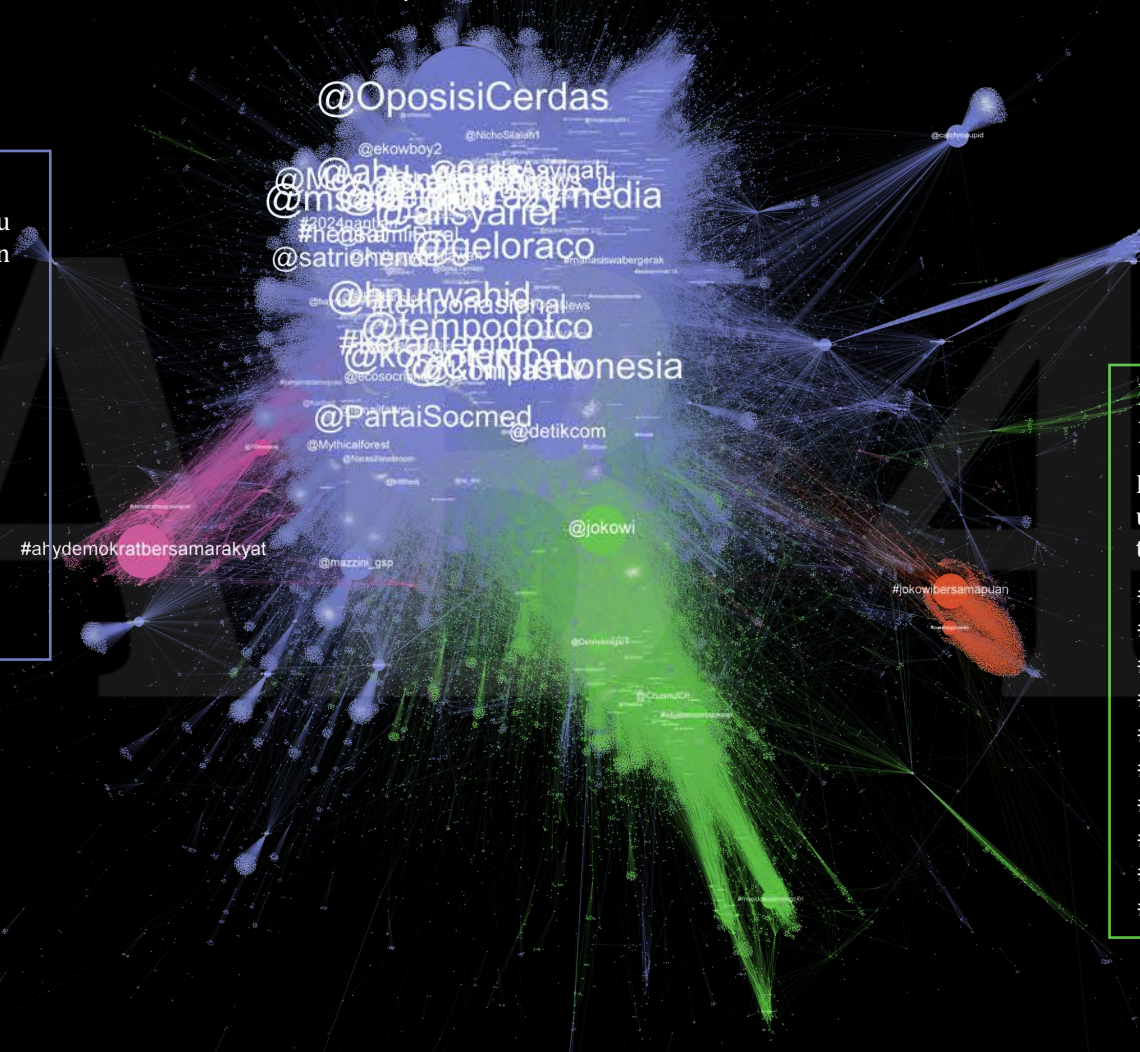
“Penundaan Pemilu & Perpanjangan Masa Jabatan Presiden”

Data Mining: 01 Januari 2022 – 09 Desember 2022

Klaster Kontra Penundaan Pemilu (72,00%)

Narasi mengenai kritik akan usulan penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Jokowi sebagai presiden yang dinilai menodai konstitusi.

#korantempo	@OposisiCerdas
#temponasional	@geloraco
#hensat	@democrazymedia
#2024gantian	@msaid_didu
#mahasiswabergerak	@alisyarief
#penjahatdemokrasi	@CNNIndonesia
#jokowi	@tempodotco
#tolak3periode	@hnurwahid
#rakyatmonitor	@abu_waras
#majalahtempo	@korantempo



Klaster Kontra Penundaan Pemilu & Pendukung Jokowi (17,16%)

Narasi mengenai respon penolakan Jokowi terhadap usulan untuk melanjutkan masa jabatan dan apresiasi terhadap kinerja Jokowi.

#sayabersamajokowi	@jokowi
#moeldokobentengnkri	@ChusnulCh__
#sikaptegasgolcardipuji	@Dennysiregar7
#sayapercajajokowi	@TeddGus
#tangkappengeroyokadearmando	@budimandjatmiko
#kamibersamajokowi	@pengarang_sajak
#tolakdemohasiswa	@GunRomli
#kspmoeldokopasangbadan	@Rizmaya__
#waspadaprovokasikadrun	@Syarman59
#bsiberbagirezeki	@yunartowijaya

Kontra 98,45%

Social Network Analysis "Revisi UU TNI & Polri"

Data Mining: 28 Mei – 14 Juli 2024

Nodes : 8.436
Edges : 12.597
Akun : 8.291
Post : 11.697

Klaster Kontra Revisi UU TNI & Polri (97,88%)

Mayoritas kelompok ini menunjukkan kekhawatiran yang mendalam terhadap dampak revisi UU TNI & Polri, terutama dalam konteks kebebasan sipil dan potensi kembalinya dwifungsi ABRI. Narasi dari kelompok ini sangat kritis terhadap pemerintah, memandang bahwa revisi undang-undang ini merupakan langkah yang berbahaya dan dapat mengancam demokrasi di Indonesia. Beberapa isu utama yang diangkat adalah:

- Ancaman terhadap kebebasan sipil.
- Kembalinya dwifungsi ABRI.
- Revisi ini dinilai merupakan bagian dari rangkaian kebijakan lain yang dianggap memperkuat kontrol negara terhadap masyarakat sipil, termasuk UU Cipta Kerja dan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
- Kekhawatiran bahwa revisi ini akan menormalisasi penggunaan kekuatan oleh negara dalam mengendalikan masyarakat, terutama dalam menanggapi kritik atau protes publik.

#temponasional	@Mythicalforest
#tolakruupolri	@mardiasih
#news	@remotivi
#newsupdate	@ObiWan_Catnobi
#text	@nden
#update	@tempodotco
#tni	@yaniarsim
#timnasday	@CNNIndonesia
#tumpasjudonline	@timpenguinnas
#iknproyekgagal	@biolahitam

@mardiasih
@remotivi
@Mythicalforest

Klaster Pro Revisi UU TNI & Polri: Indikasi Buzzer (2,12%)

Kelompok Pro Revisi UU TNI & Polri menunjukkan pola yang lebih sederhana dan tampak seperti aktivitas akun buzzer. Cuitan-cuitan yang mendukung revisi UU ini bersifat repetitif, dengan argumen yang konsisten namun tanpa penjelasan rinci.

#undangundang	@ragheeell
#indian2	@OposisiLieur
#nato	
#bini	
#tegakkanhukum	
#kpkri	
#kpk	

Pro 2,12%

Kontra 97,88%



Modernisasi TNI di Bawah Jokowi: Profesional atau Politis?

08 Oktober 2024

Modernisasi Alutsista

- Anggaran Pertahanan
- Pemenuhan MEF
- Kecelakaan
- Pengadaan ASEAN-6

Tata Kelola Organisasi

- Beban Angkatan 1988
- Validasi Organisasi dan Satuan Baru
- Pola Mutasi TNI

Kontrol Sipil Militer

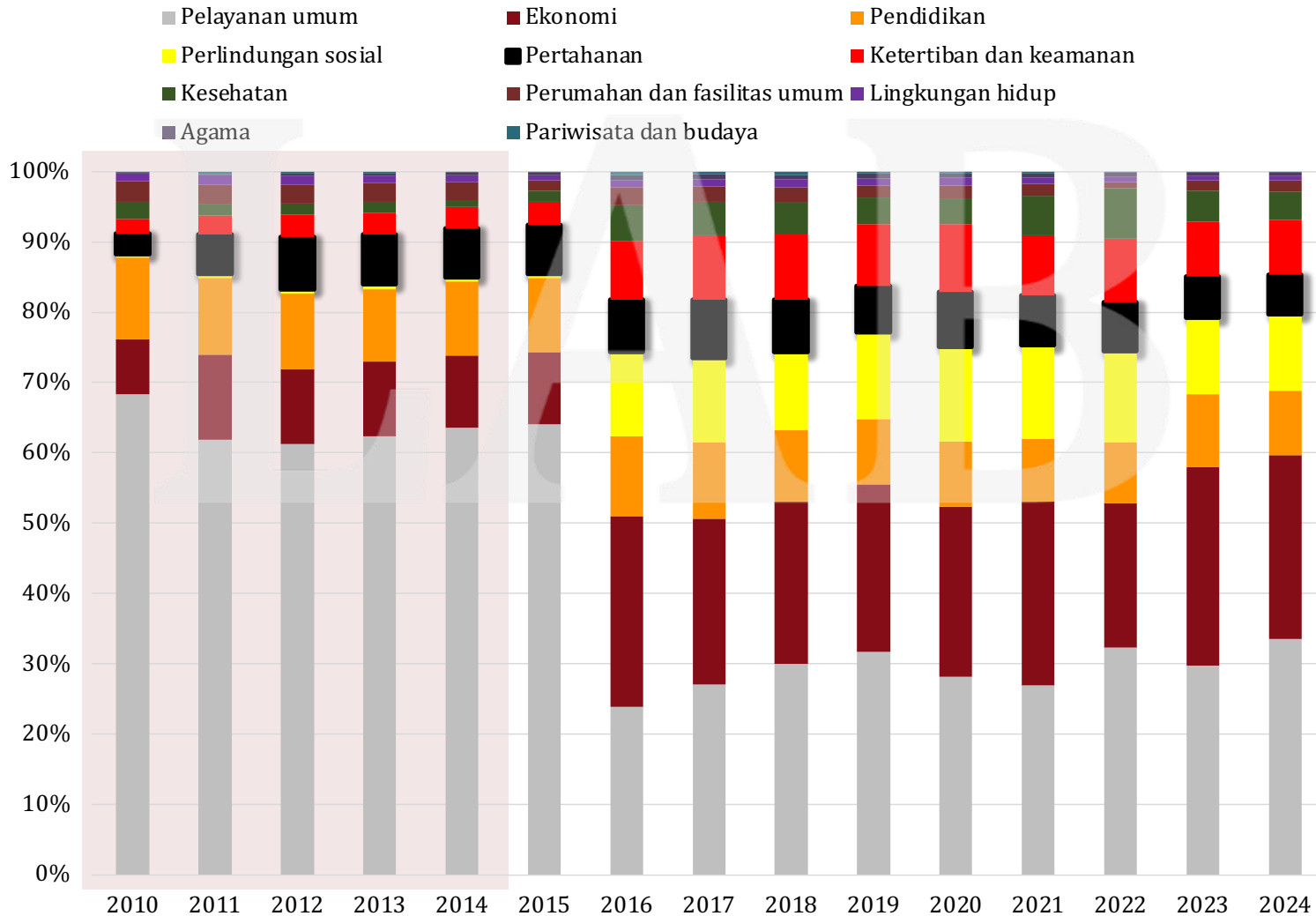
- Penempatan Perwira Aktif
- Regulasi Bidang Pertahanan

Modernisasi Alutsista

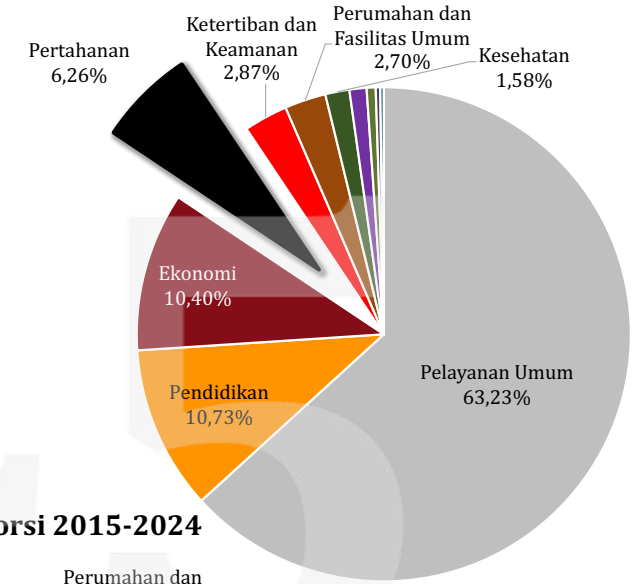
Belanja Pemerintah Berdasarkan Fungsi

Dibandingkan pertahanan, alokasi belanja pemerintah di era Presiden Jokowi jauh lebih memprioritaskan sektor ekonomi dan perlindungan sosial

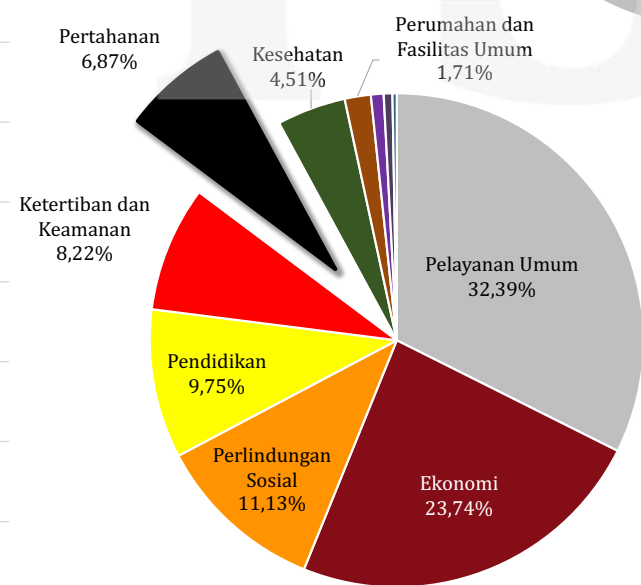
Persentase 2010-2024



Porporasi 2010-2014

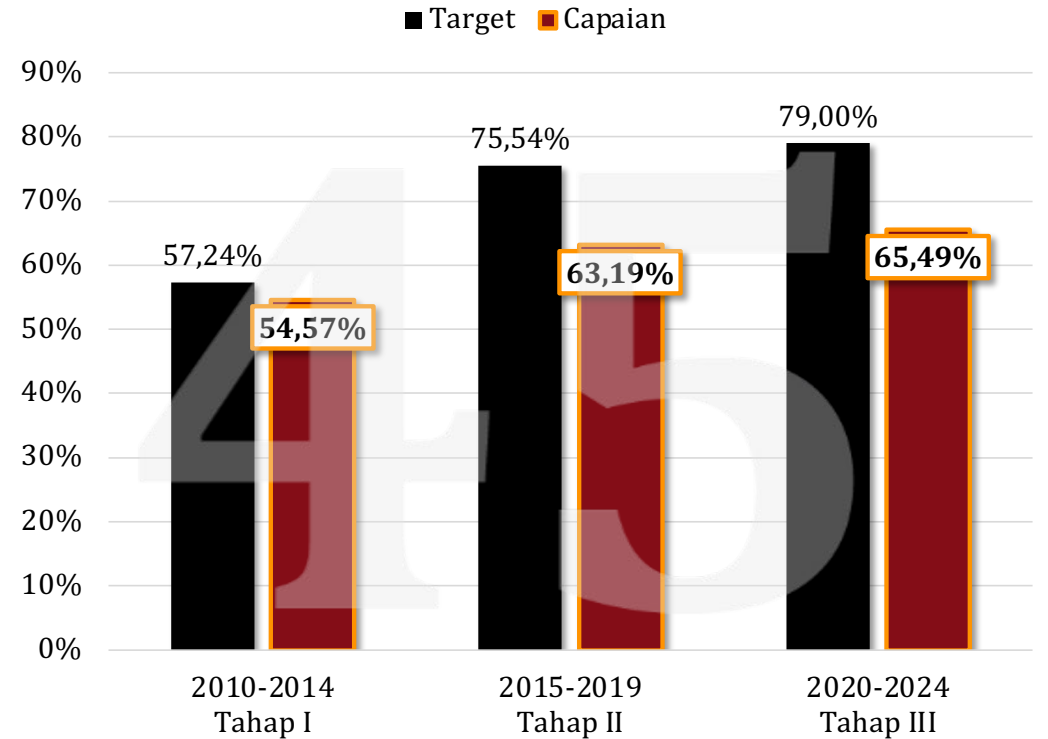
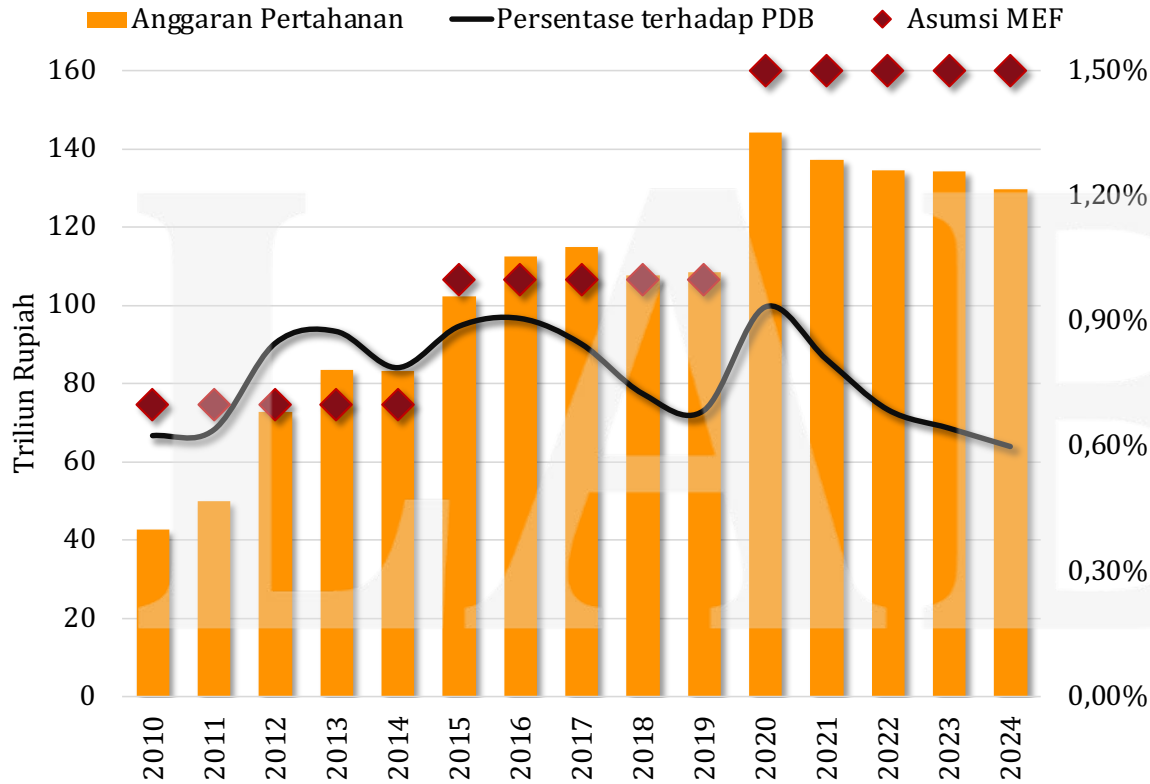


Porporasi 2015-2024



Anggaran Pertahanan dan MEF

Target modernisasi pertahanan di era Presiden Jokowi tidak tercapai karena tidak terpenuhinya asumsi ekonomi makro



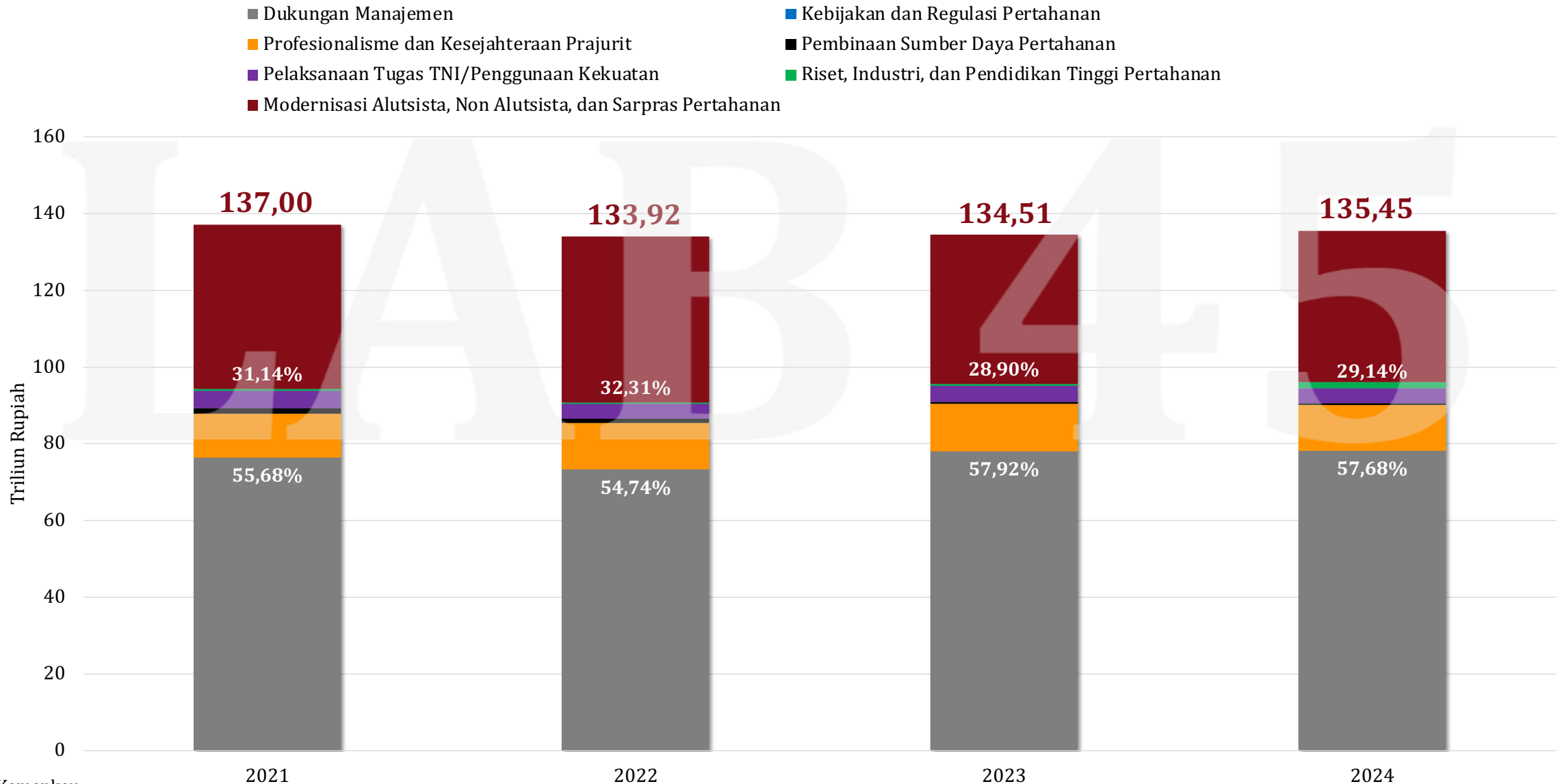
Asumsi ekonomi pertahanan pada MEF:

- Pertumbuhan ekonomi sebesar 7%
- Persentase anggaran pertahanan naik bertahap
 - Renstra I : 0,7%
 - Renstra II : 1%
 - Renstra III : 1,5%

	2010-2014 Tahap I	2015-2019 Tahap II	2020-2024 Tahap III
Pertumbuhan Ekonomi	5,8%	5,03%	3,42%
Anggaran/PDB	0,75%	0,81%	0,73%
Nilai Tukar	Rp10.483	Rp13.814	Rp15.056
Target Nilai Tukar	Rp9.830	Rp13.560	Rp13.814
Tingkat Inflasi	5,18%	3,17%	2,7%
Target Inflasi	5,7%	4,8%	3,9%

Alokasi Anggaran Pertahanan

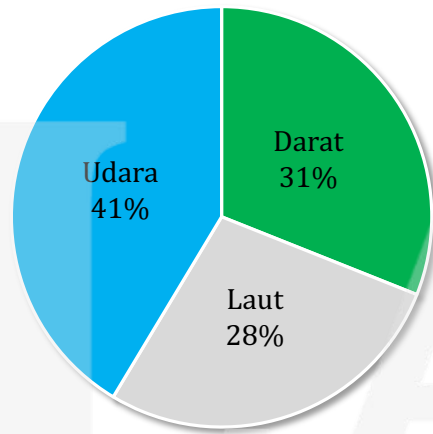
Keterbatasan anggaran di sektor pertahanan banyak dihabiskan untuk “overhead cost” alih-alih untuk modernisasi alutsista



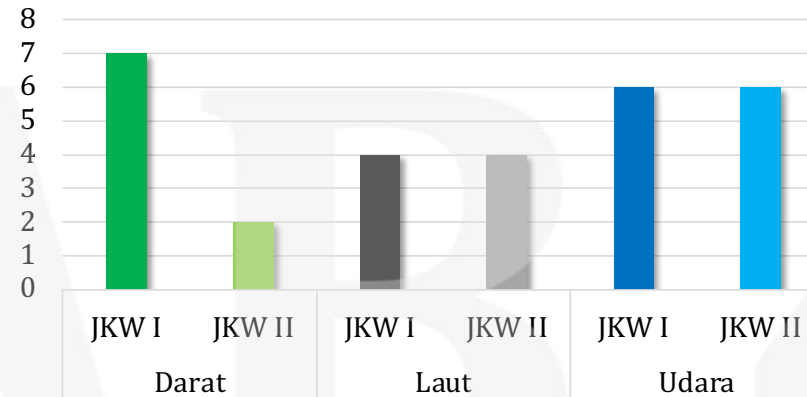
Kecelakaan Alutsista (2014-2024)

Kegagalan Presiden Jokowi dalam menerapkan "zero-tolerance policy" terlihat dari masih banyaknya faktor campuran sebagai penyebab kecelakaan, terutama masalah struktural

Jumlah Kecelakaan (N=29)

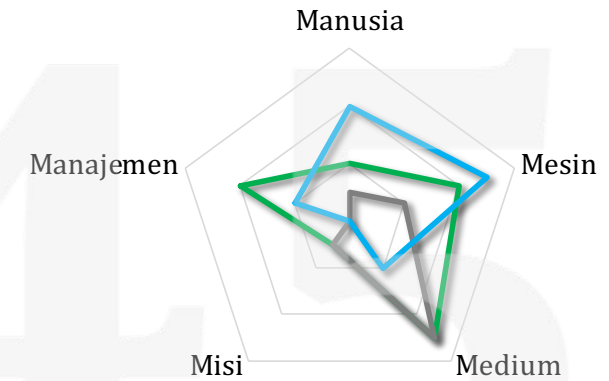


Jumlah Kecelakaan Berdasarkan Periode Kepresidenan Joko Widodo



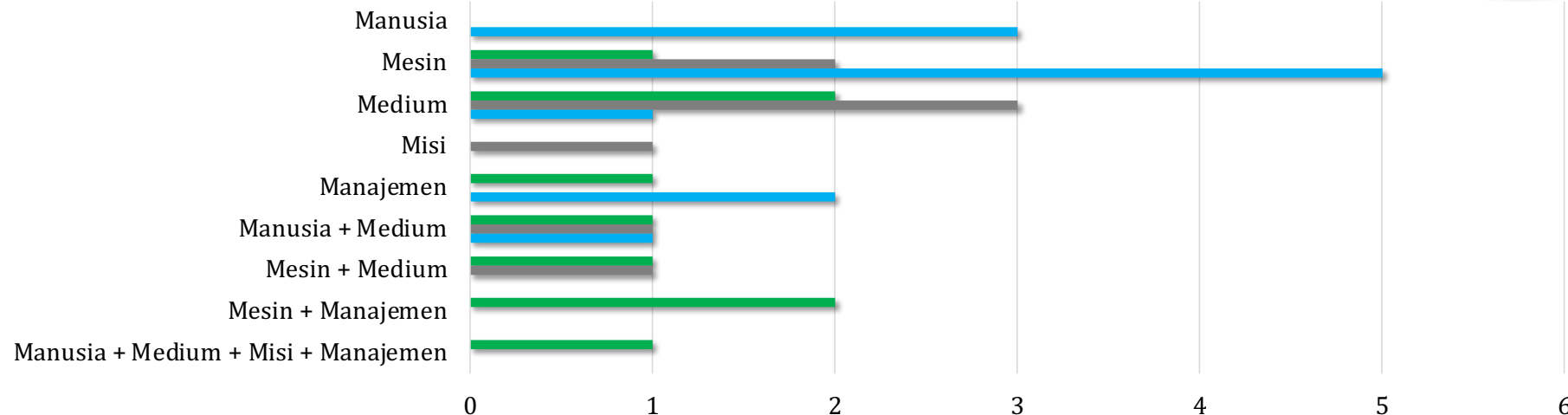
Penyebab Kecelakaan

— Darat — Laut — Udara



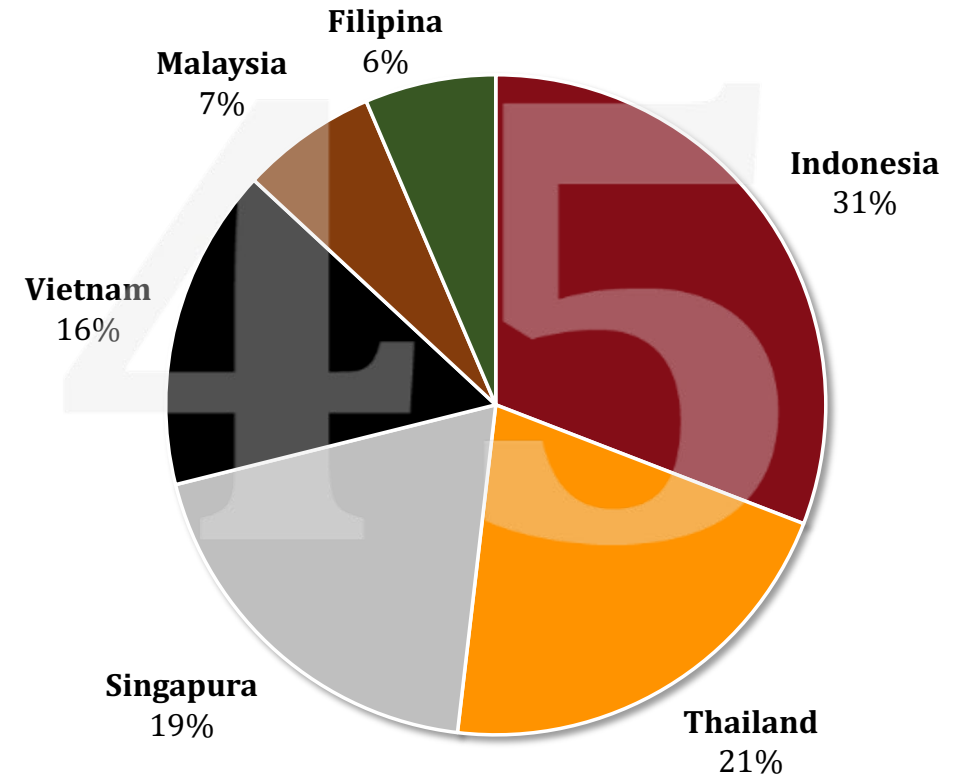
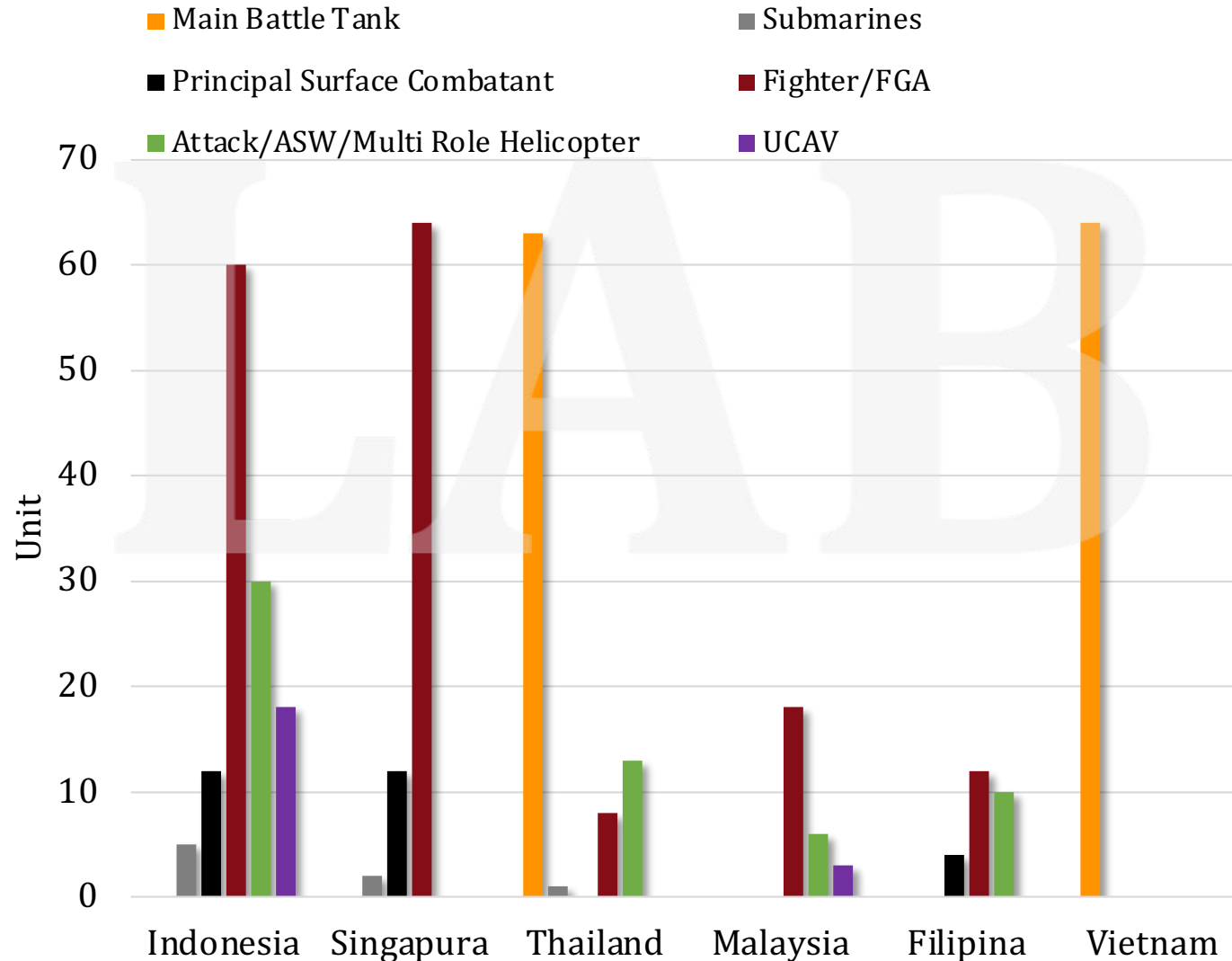
Faktor Campuran Penyebab Kecelakaan

■ Darat ■ Laut ■ Udara



Pengadaan Persenjataan Utama ASEAN-6 (2014-2024)

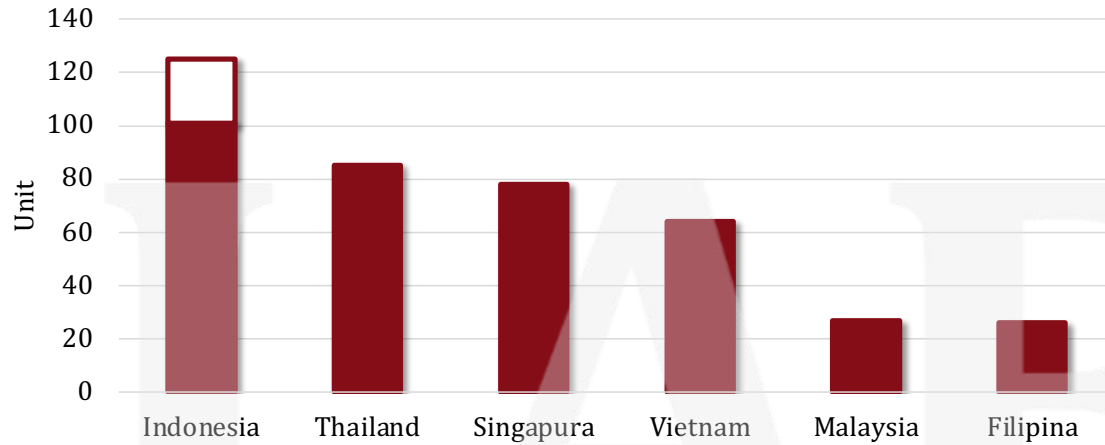
Jenis Persenjataan



Pengadaan Persenjataan Utama ASEAN-6 (2014-2024)

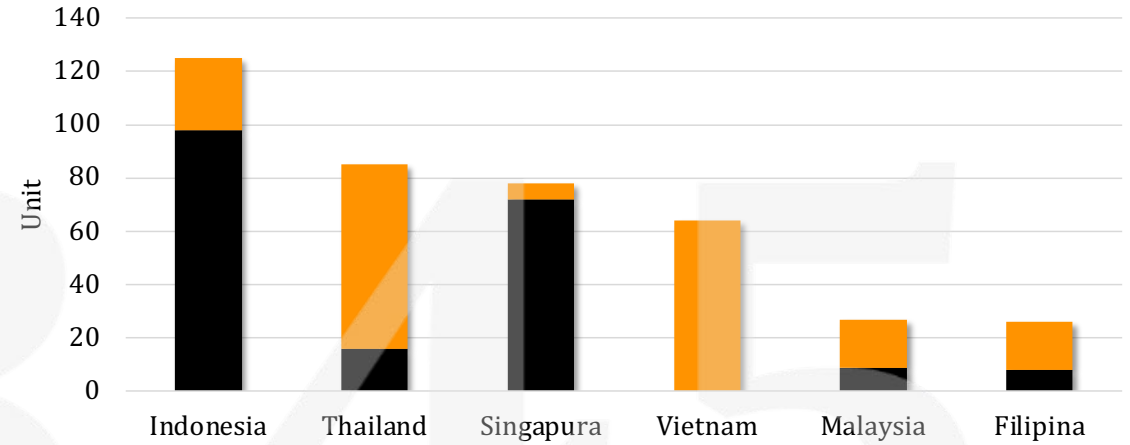
Jenis Pengadaan

■ Impor ■ Dalam Negeri



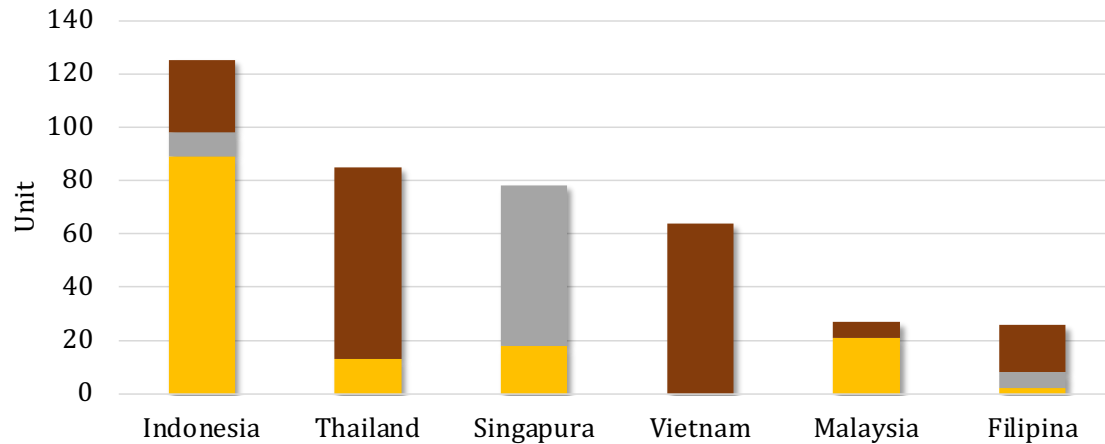
Negara Penyedia

■ NATO ■ Non-NATO



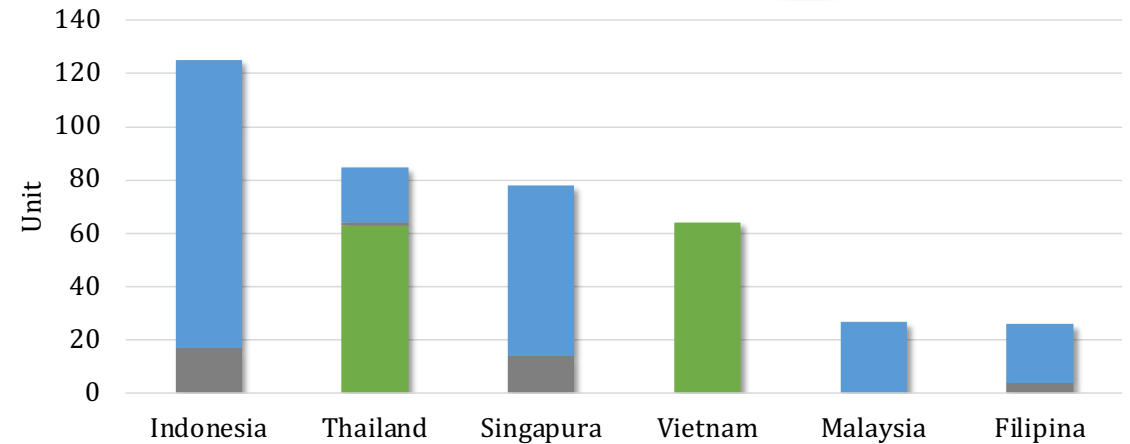
Status Kontrak

■ Tanda Tangan ■ Dalam Pengiriman ■ Selesai



Platform

■ Darat ■ Laut ■ Udara

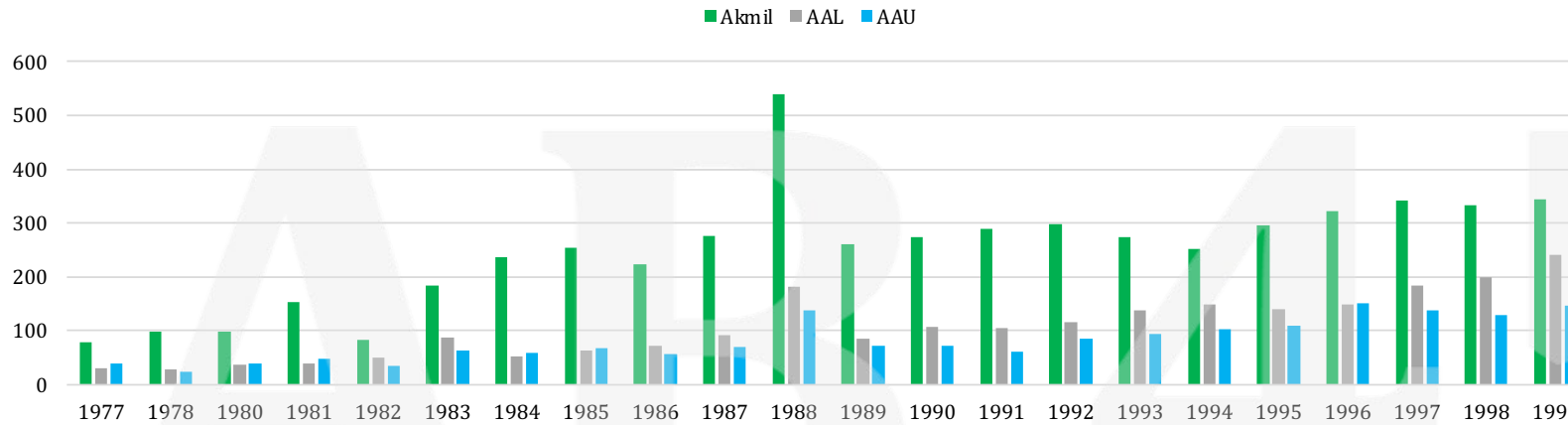


Tata Kelola Organisasi

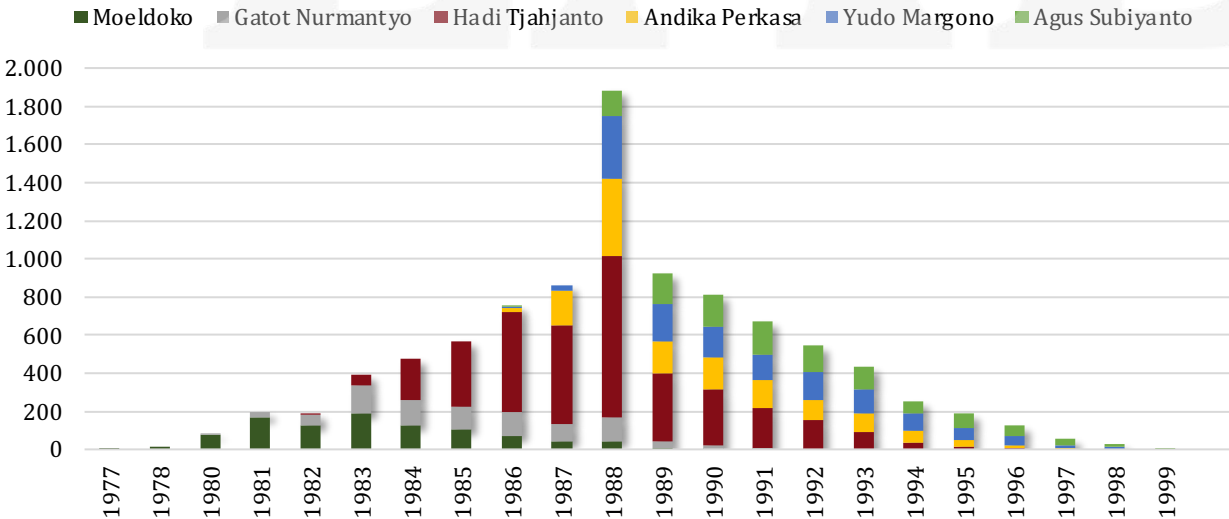
Beban Angkatan 1988

Presiden Jokowi menghadapi bom waktu angkatan 1988 yang menciptakan masalah penumpukan (logjam) perwira tinggi nonjob di organisasi TNI

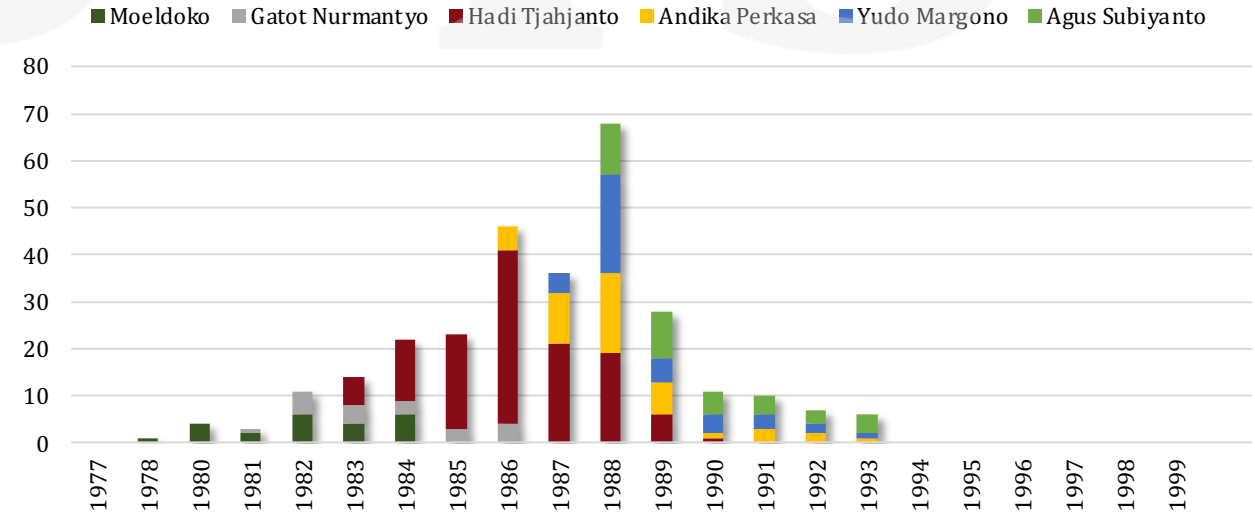
Alumni Akademi Kemiliteran



Mutasi Perwira Tinggi TNI 2014-2024



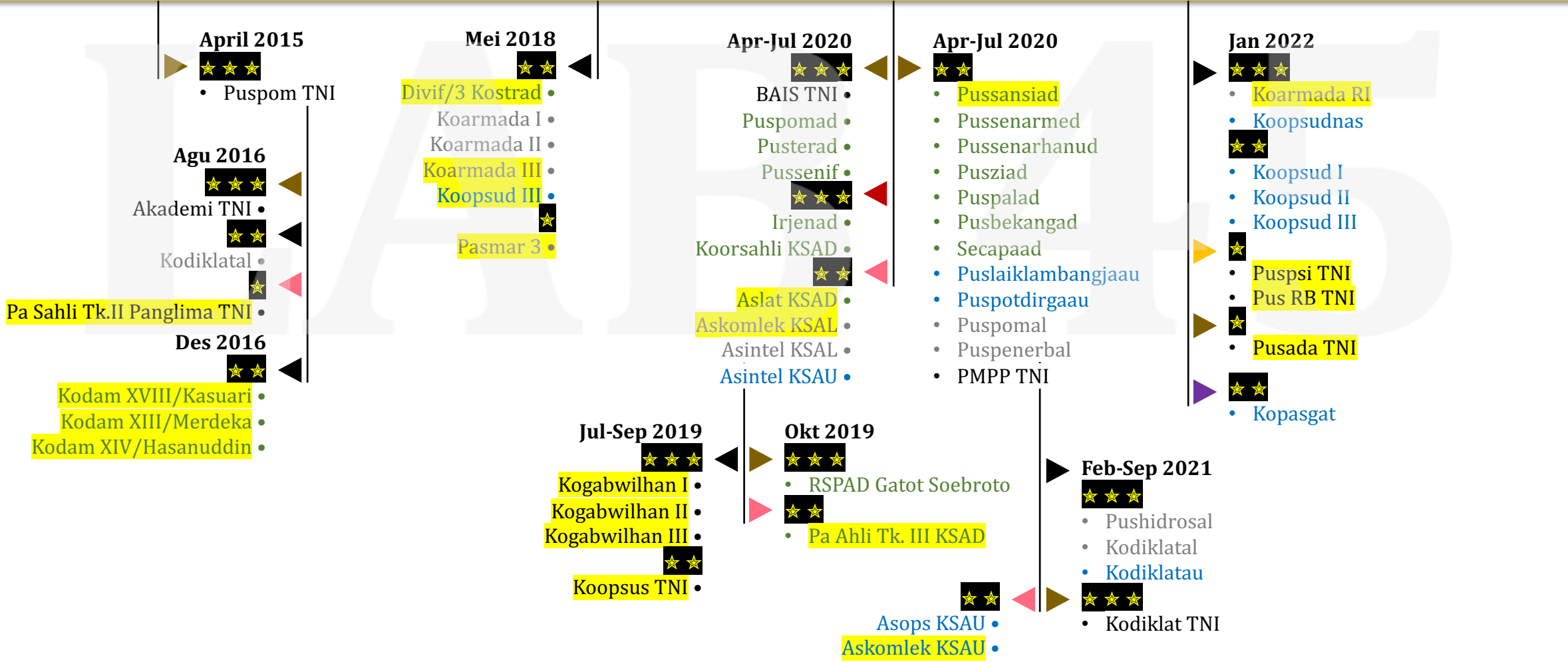
Mutasi Perwira Tinggi TNI Bintang 3 2014-2024



Validasi Organisasi dan Satuan Baru

Penambahan organisasi baru bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme prajurit melalui operasi gabungan, sekaligus untuk mengatasi masalah penumpukan (logjam) prajurit TNI

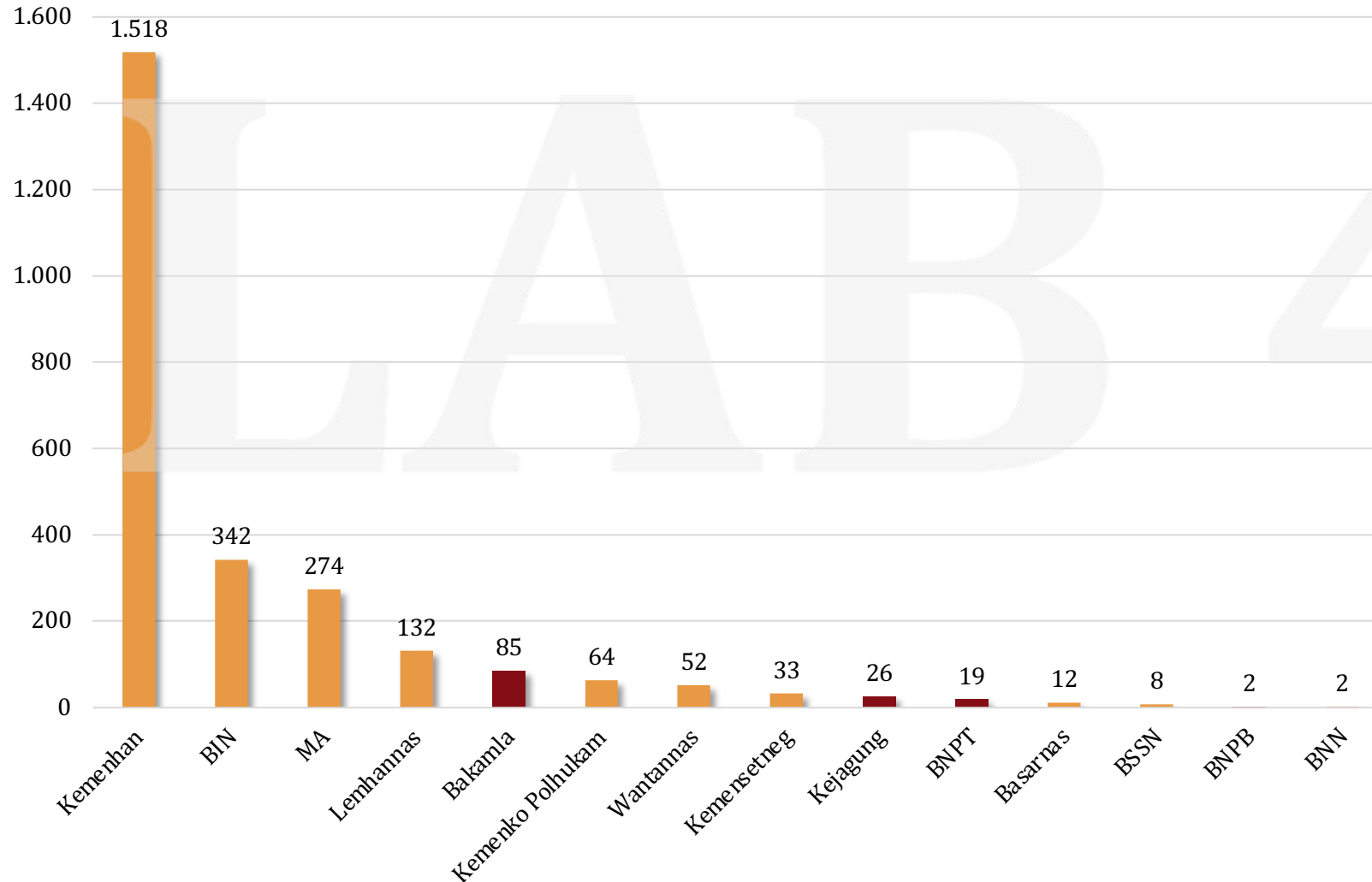
▶ Pimpinan ▶ Pembantu Pimpinan ▶ Satuan Khusus ▶ Pelayanan ▶ Badan Pelaksana Pusat ▶ Kotama Pembinaan/Operasi



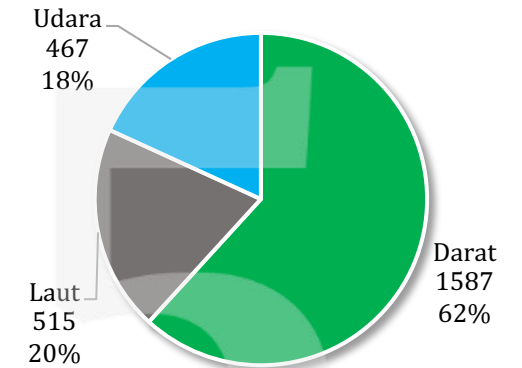
Sumber: SKEP Panglima TNI (2014-2024); Pemberitaan Daring (2014-2024)

Prajurit TNI di Kementerian/Lembaga

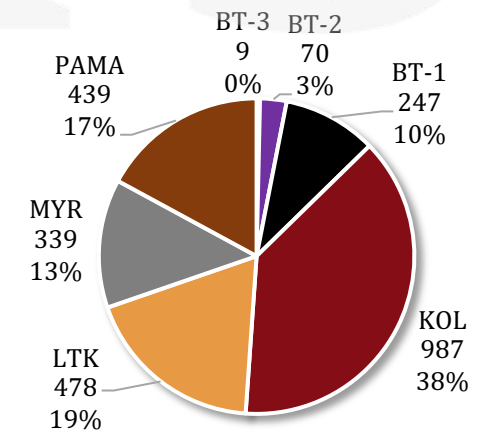
Jalan pintas lain dalam mengatasi penumpukan (logjam) prajurit TNI di era Presiden Jokowi adalah dengan mendorong perwira aktif untuk menduduki jabatan sipil, bahkan hingga menjadi poin utama dalam wacana revisi UU TNI



Sebaran berdasarkan Matra

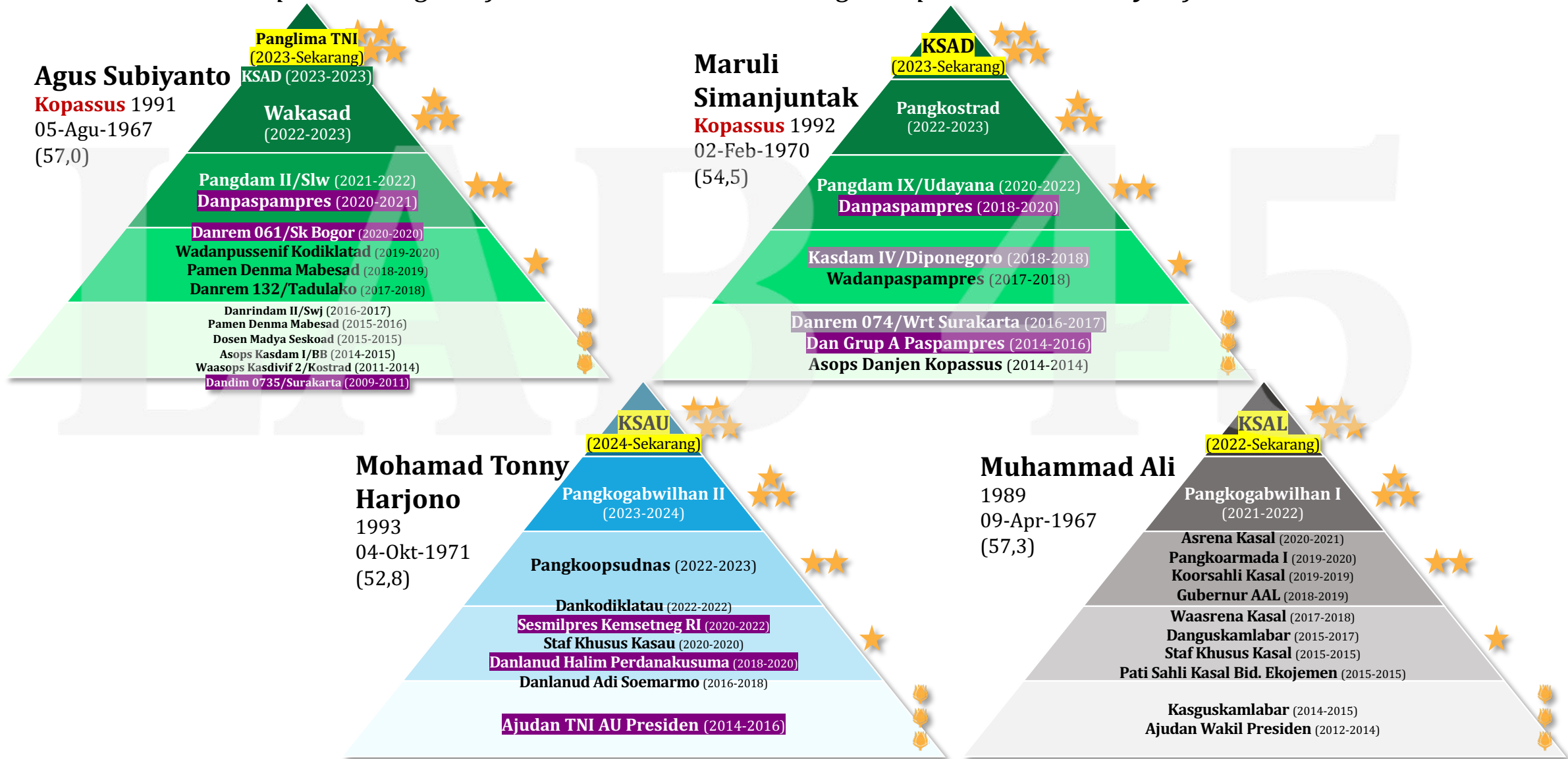


Sebaran berdasarkan Pangkat



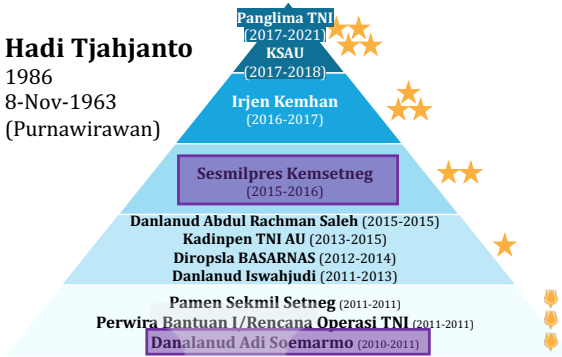
Pola Karier Perwira Tinggi TNI

Era Presiden Jokowi memperdalam politisasi dalam mutasi perwira tinggi dengan mempertimbangkan faktor kedekatan dibanding kompetensi dan riwayat jabatan

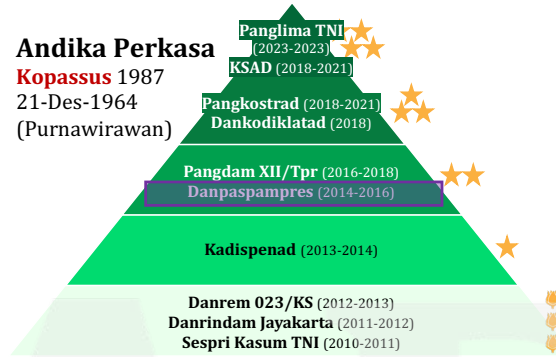


Pola Karier Perwira Tinggi TNI

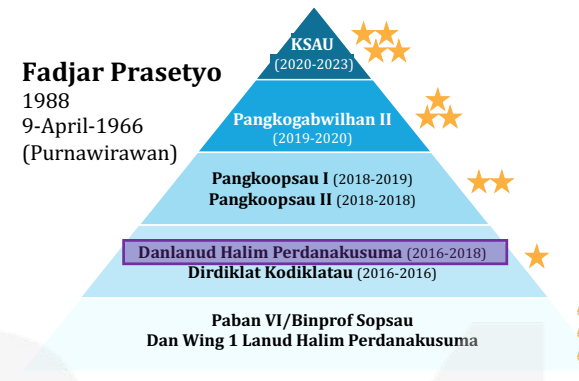
Hadi Tjahjanto
1986
8-Nov-1963
(Purnawirawan)



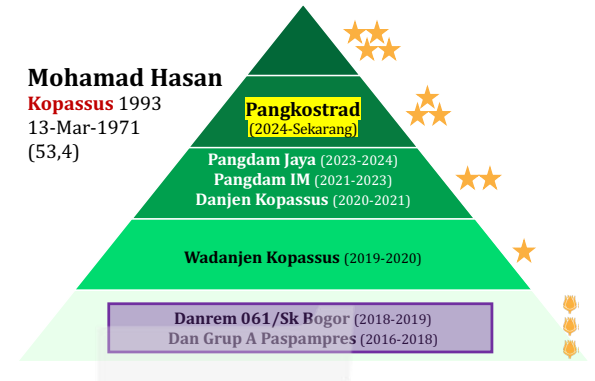
Andika Perkasa
Kopassus 1987
21-Des-1964
(Purnawirawan)



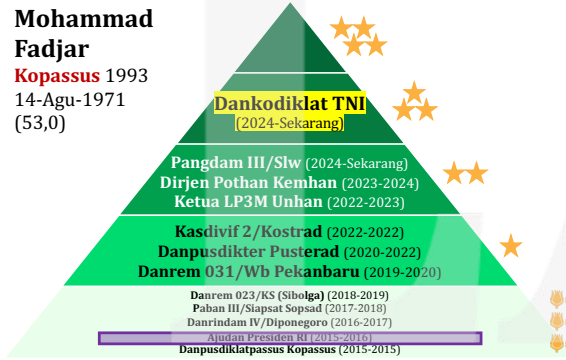
Fadjar Prasetyo
1988
9-April-1966
(Purnawirawan)



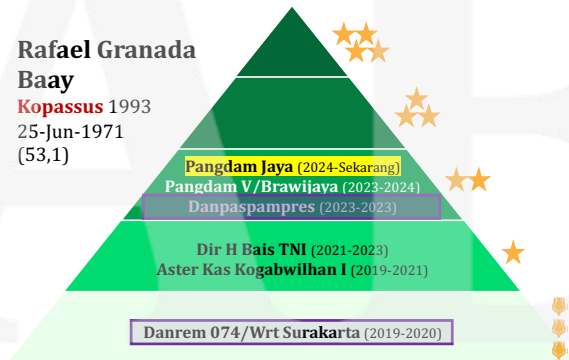
Mohamad Hasan
Kopassus 1993
13-Mar-1971
(53,4)



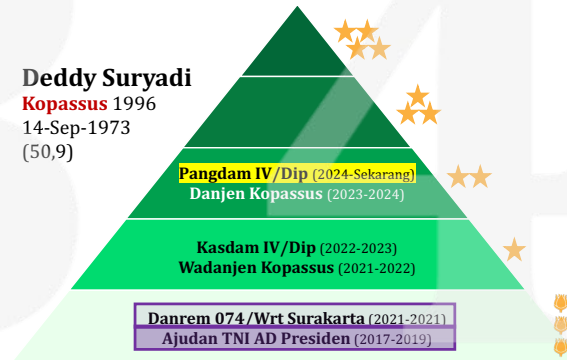
Mohammad Fadjar
Kopassus 1993
14-Agu-1971
(53,0)



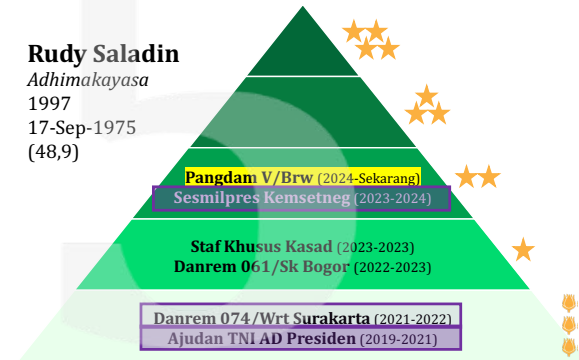
Rafael Granada Baay
Kopassus 1993
25-Jun-1971
(53,1)



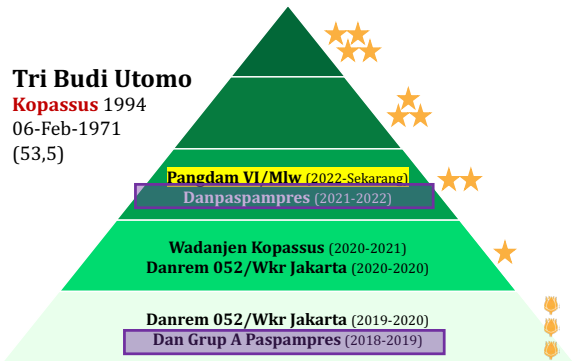
Deddy Suryadi
Kopassus 1996
14-Sep-1973
(50,9)



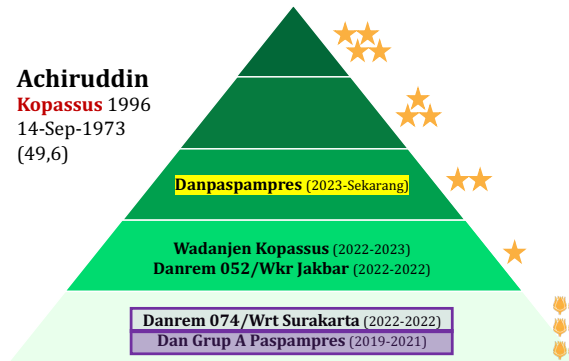
Rudy Saladin
Adhimakayasa
1997
17-Sep-1975
(48,9)



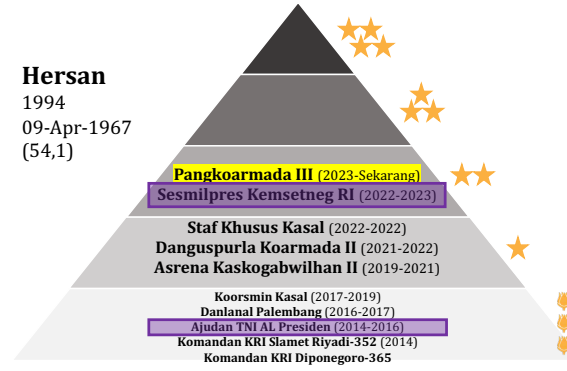
Tri Budi Utomo
Kopassus 1994
06-Feb-1971
(53,5)



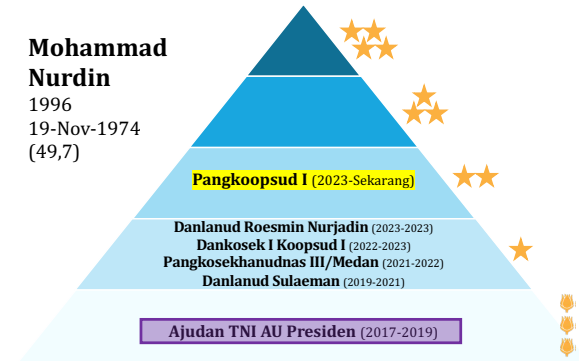
Achiruddin
Kopassus 1996
14-Sep-1973
(49,6)



Hersan
1994
09-Apr-1967
(54,1)

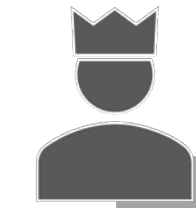


Mohammad Nurdin
1996
19-Nov-1974
(49,7)



Kontrol Sipil-Militer

Relasi Pemangku Kepentingan



Presiden

- Tidak terlihat menjaga mandat reformasi
- Pelibatan TNI untuk keperluan ekonomi



Kabinet

- Kepala Lembaga mengundang TNI ke jabatan sipil
- Kementerian Pertahanan sebagai *quasi sipil*
- Revisi UU ASN oleh Kementerian PAN RB
- Politik anggaran Kementerian Keuangan dan Bappenas



Parlemen

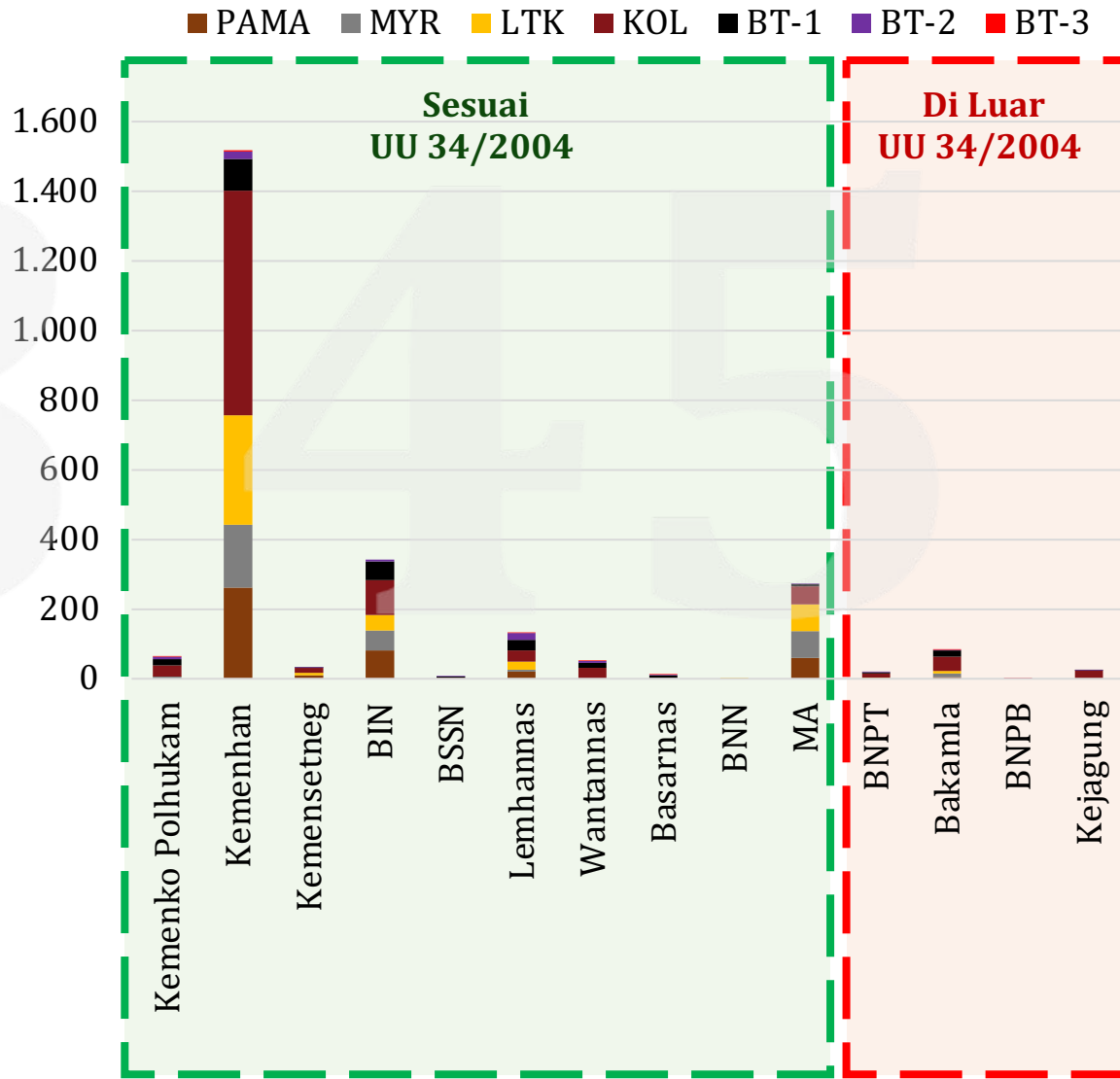
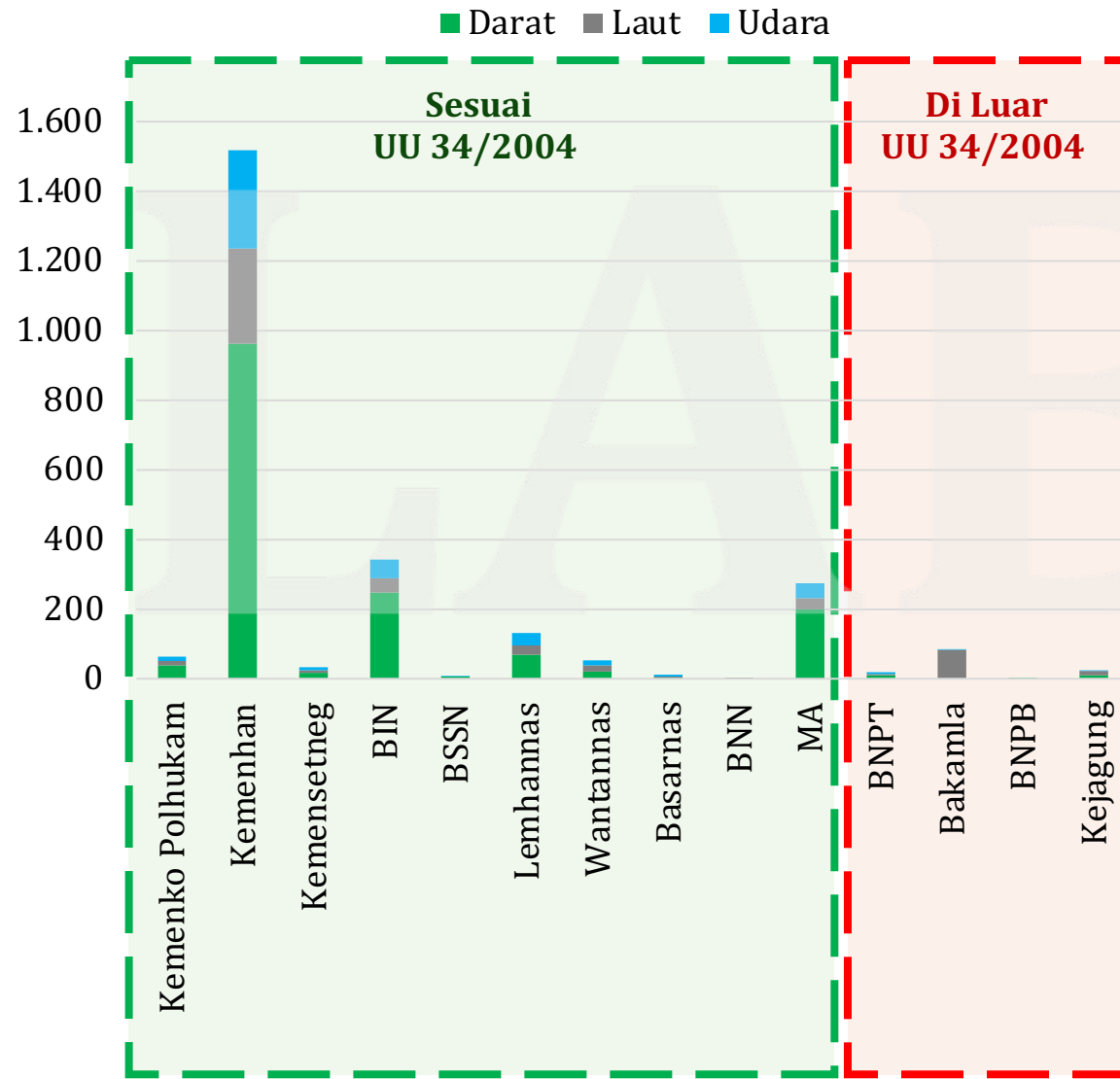
- Wewenang pengawasan anggaran
- Kompetensi Komisi I
- Proses legislasi sektor pertahanan

“Tidak ada visi misi Menteri, yang ada visi misi Presiden”

– Presiden Joko Widodo, Oktober 2019

Prajurit TNI di Kementerian/Lembaga

Kendali demokratis sipil di era Presiden Jokowi ditandai dengan 'sipil yang lemah', karena justru mengundang dan membuka pintu bagi pelibatan militer di ranah sipil

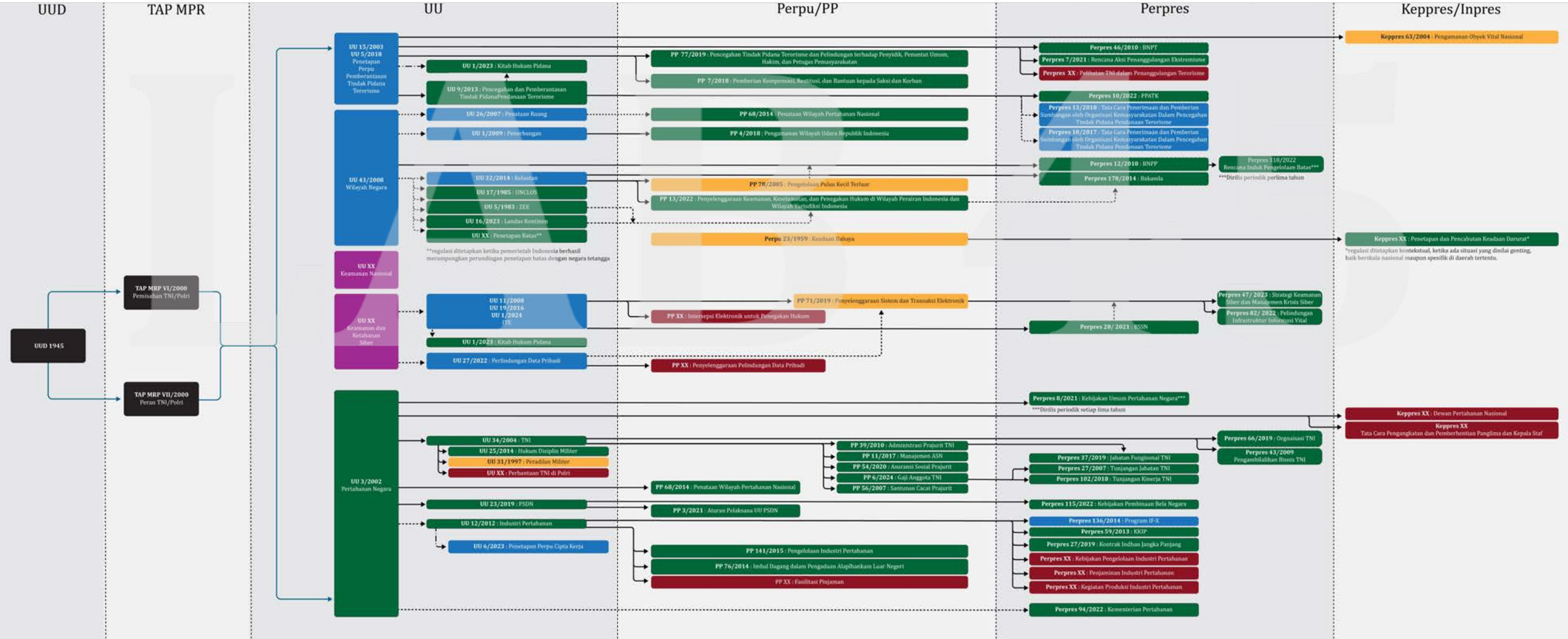


Sumber: Staf Personel TNI (2023)

Regulasi Bidang Pertahanan

Banyak pekerjaan rumah yang belum diselesaikan di era Presiden Jokowi meski memiliki dukungan mayoritas di DPR

→ Mandat/menjadi acuan
 -----> Substansi terkait
 - - - - -> Diubah/dicabut Sebagian oleh regulasi lain
 Kelembagaan
Regulasi Induk
Menjadi mandat regulasi lain/diatasnya
Tidak menjadi mandat regulasi lain/diatasnya
Menjadi mandat regulasi lain/diatasnya tetapi regulasi belum tersedia
Regulasi berlaku yang perlu ditinjau/direvisi
Regulasi belum tersedia dan tidak menjadi mandat regulasi lain/diatasnya tetapi bersifat strategis untuk diundangkan



Rekomendasi

**Perbesar Anggaran
Pertahanan**

Posisi strategis berdasarkan
kompetensi dan tangga karier
yang profesional

Menuntaskan
kebutuhan
regulasi di
sektor
pertahanan

Target
pembangunan
jangka pendek
sesuai potensi
krisis

Rencana
modernisasi dan
pembangunan
pertahanan
jangka panjang

Hindari faktor
kedekatan
personal

Penempatan
prajurit aktif TNI
di jabatan sipil
tidak
dimanfaatkan
secara sporadis

**Tegas
memegang
semangat
reformasi**



TERIMA KASIH